

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Literasi Keuangan

2.1.1 Pengertian Literasi Keuangan

Perkembangan industri jasa keuangan semakin meningkat dan semakin kompleks sehingga mengubah kondisi pasar keuangan. Oleh karena itu, seseorang perlu memahami pengetahuan dasar keuangan yang berhubungan dengan kunci keamanan keuangan modern (Mandell & Klein, 2007: 105). Pengetahuan ini mutlak diperlukan oleh setiap individu agar dapat memanfaatkan instrumen maupun produk keuangan secara optimal guna mengambil keputusan secara tepat untuk kesejahteraannya. Seperti yang diungkapkan ASIC (2013: 6) bahwa literasi keuangan dapat membantu seseorang untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik serta mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Menurut Chen dan Volpe (2002: 108) literasi keuangan diartikan sebagai kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi. Sedangkan, Garman & Fogue (2010: 4) menyebutkan bahwa literasi keuangan merupakan pengetahuan tentang fakta, konsep, prinsip dan alat teknologi yang mendasari untuk cerdas dalam menggunakan uang. Selanjutnya, Robert T. Kiyosaki (2003: 57) menjelaskan literasi keuangan sebagai kemampuan untuk membaca dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan masalah finansial/keuangan. Lebih lanjut dijelaskan, literasi keuangan menurut Huston (2010: 307-308) diartikan sebagai komponen sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan. Seseorang dikatakan melek keuangan ketika memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut.

Menurut Lisa Xu dan Bilal Zia (2012) mengatakan bahwa istilah literasi keuangan mencakup konsep yang dimulai dari kesadaran dan

pemahaman tentang produk-produk keuangan, institusi keuangan, dan konsep mengenai keterampilan keuangan seperti kemampuan untuk menghitung pembayaran bunga majemuk serta kemampuan keuangan yang lebih umum seperti pengelolaan uang dan perencanaan keuangan.

Pengertian lain mengenai literasi keuangan yaitu merupakan sebuah pemahaman mengenai konsep keuangan dan kemampuan dalam pengelolaan keuangan yang tepat dalam membuat keputusan jangka panjang maupun jangka pendek sesuai dengan keadaan ekonomi (Hung, 2009; Remund, 2010, Huston 2010). Literasi keuangan merupakan kemampuan pemahaman untuk mencapai tingkat pemahaman yang baik, sehingga pemahaman, perilaku, dan keahlian merupakan hal yang berpengaruh terhadap literasi keuangan Schimitz dan Bova (2013) (Lusardi dan Mitchell, 2014). Byrne (2007) mengemukakan bahwa pemahaman keuangan yang rendah akan menyebabkan pembuatan rencana keuangan yang salah, dan menyebabkan pencapaian kesejahteraan disaat usia tidak produktif.

Sedangkan definisi lebih lengkap dijelaskan oleh Vitt, *et al* (2000:2), *Personal financial literacy is the ability to read, analyze, manage and communicate about the personal financial condition that affect material well-being. It includes the ability to discern financial choices, discuss money and financial issues without (or despite) discomfort, plan for the future and respond competently to life events that affect everyday financial decisions, including events in the general economy.* Dengan kata lain melek keuangan pribadi merupakan kemampuan untuk membaca, menganalisis, mengelola, dan berkomunikasi tentang kondisi keuangan pribadi yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi. Hal ini mencakup kemampuan untuk membedakan pilihan keuangan, mendiskusikan masalah keuangan, rencana masa depan, dan kompetensi menanggapi peristiwa kehidupan yang mempengaruhi keputusan keuangan sehari-hari maupun peristiwa dalam perekonomian secara umum.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan merupakan pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola keuangan guna meningkatkan kesejahteraan.

2.1.2 Faktor Faktor yang Mempengaruhi Literasi Keuangan

Tingkat literasi keuangan yang dimiliki oleh setiap orang berbeda-beda. Perbedaan tingkat literasi keuangan itulah yang menyebabkan terjadinya perbedaan signifikan antara individu satu dengan yang lainnya dalam mengumpulkan aset baik jangka pendek maupun jangka panjang. Chiara Monticone (2010) menjelaskan bahwa tingkat literasi keuangan seseorang dipengaruhi oleh: karakteristik demografi (gender, etnis, pendidikan dan kemampuan kognitif), latar belakang keluarga, kekayaan serta preferensi waktu. Sedangkan Angelo Capuano dan Ian Ramsay (2011) menjelaskan bahwa faktor personal (intelegensi dan kemampuan kognitif), sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi literasi keuangan dan perilaku keuangan seseorang. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi factor perbedaan tingkat literasi keuangan seseorang, baik faktor dari dalam diri individu dan faktor di luar individu.

2.1.3 Indikator Literasi Keuangan

Menurut penelitian Mendari & Kewal (2013) indikator literasi keuangan dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu :

1. Pengetahuan Dasar Keuangan Pribadi
2. Tabungan dan Pinjaman
3. Asuransi
4. Investasi

2.2 Gender

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2003:353), gender adalah jenis kelamin. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa gender tidak dibedakan dengan jenis kelamin. Akan secara mendasar, gender berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian mutlak dari Tuhan. Namun, jalan yang menjadikan seseorang maskulin atau feminim adalah gabungan blok-blok bangunan biologis dasar dan intrerpretasi biologis oleh kulturnya (Mosse, 2007:2). Setiap masyarakat mempunyai aturan main yang diikuti oleh anggotanya seperti berjalan memainkan peran feminim atau maskulin. Sejak bayi hingga menginjak usia tua, seseorang mempelajari dan mengaplikasikan cara-cara khusus untuk menjadi laki-laki dan perempuan yang telah ditentukan oleh masyarakat.

Secara terminologi menurut Elfi Muawanah (2009: 2) gender diartikan sebagai konsep yang berkaitan dengan peran laki-laki dan perempuan di suatu waktu dan budaya tertentu yang dikonstruksi secara sosial bukan secara biologis. Sejalan dengan definisi tersebut konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Mansour Fakih, 2006:8). Selanjutnya gender diartikan sebagai seperangkat peran (yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga) yang menyampaikan kepada orang lain bahwa seseorang adalah feminis atau maskulin (Mosse, 2007:3).

Dari beberapa definisi tersebut, peneliti mengartikan bahwa gender merupakan seperangkat peran laki-laki dan perempuan di suatu waktu dan budaya tertentu yang dikonstruksi secara sosial bukan secara biologis. Gender bukanlah definisi permanen tentang cara “alami” bagi perempuan dan laki-laki berperilaku (Mosse, 2007:4) karena semua hal yang dapat di pertukarkan antara sifat maupun perilaku perempuan dan laki-laki bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya (Mansour Fakih,2006).

Sementara itu, analisis gender merupakan pengkajian pembagian kerja yang berbasis jenis kelamin, akses dan kontrol yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki (Elfi Muawanah, 2009:10). Gender dapat menentukan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, harapan hidup, serta kebebasan hidup seseorang. Selanjutnya, gender ini akan menentukan seksualitas, hubungan dan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dan bertindak secara autonom (Moose, 2007:5) baik dalam hal kekuasaan, status dan kontrol sumber daya (Elfi Muawanah, 2009: 12). Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa gender merupakan salah satu faktor penting bagi individu untuk membuat keputusan dalam kehidupannya baik secara social maupun ekonomi.

2.3 Tingkat Pendidikan

Menurut Undang-Undang No. 29 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (1) menjelaskan pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

2.3.1 Indikator Tingkat Pendidikan

Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Bab IV pasal 14 menjeaskan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Adapun 3 (tiga) tingkat pendidikan itu adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah

menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

2. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah pendidikan umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat.

3. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doctor yang diseleenggarakan oleh perguruan tinggi. Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Institut menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau pendidikan vokasi dalam kelompok sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

2.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM sering kali dihubungkan dengan modal yang terbatas, yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan sebuah usaha. Umumnya, jenis usaha ini erat berkaitan dengan kategori masyarakat kelas

menengah ke bawah (Raja, 2010:1). Bentuk UMKM dapat berupa perusahaan perseorangan, persekutuan, seperti misalnya firma dan CV, maupun perseroan terbatas. Di Indonesia sendiri UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun ketentuan umum yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini yaitu sebagai berikut :

1. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
2. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa UMKM telah memenuhi syarat dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
3. Jangka waktu adalah kondisi tingkatan lamanya pengembangan usaha yang diberikan kepada UMKM.
4. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan UMKM secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundangundangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi, agar UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluasluasnya.
5. Pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam pemberdayaan pemerintah dilakukan dengan cara :
 - Pengembangan Usaha
 - Perizinan
 - Koordinasi dan Pengendalian
 - Kemitraan

Adapun pengembangan usaha yang telah dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah yaitu sebagai berikut :

1. Pengembangan usaha dilakukan terhadap UMKM meliputi :
 - Fasilitasi pengembangan usaha
 - Kegiatan pengembangan
 - Pelaksanaan pengembangan usaha

Pelaksanaan ini dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi. Adapun pengembangan UMKM ini dilakukan melalui :

1. Pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi.
2. Penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi.
3. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan.
4. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

Pengembangan UMKM ini dilaksanakan melalui pendekatan berupa :

1. Koperasi
2. Sentra
3. Klaster
4. Kelompok

Adapun unsur-unsur dalam kemitraan pada UMKM yaitu :

- Pola Kemitraan
- Inti Plasma
- Subkontrak
- Waralaba
- Perdagangan umum
- Distribusi dan keagenan
- Bagi hasil
- Kerjasama operasional
- Usaha patungan
- Penyumberluaran dan
- Bentuk kemitraan lainnya

2.4.1 Karakteristik UMKM

Tabel 2.1 Karakteristik UMKM

Ukuran Usaha	Karakteristik
Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap; sewaktu-waktu dapat berganti • Tempat usahanya tidak selalu menetap; sewaktu-waktu dapat pindah tempat • Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun • Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. • Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai • Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah • Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank • Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP
Usaha Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah • Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah • Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana • Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga • Sudah membuat neraca usaha • Sudah memiliki izin usaha dan

	<p>persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha. • Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal • Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti <i>business planning</i>
Usaha Menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi • Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk <i>auditing</i> dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan • Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan • Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga • Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan

2.4.2 Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah. Fenomena masalah yang sering terjadi dan banyak dihadapi oleh para pengelola UMKM salah satunya adalah masalah permodalan untuk mengembangkan usaha yang sangat kompetitif sehingga

produk juga harus diperkuat. Pentingnya penerapan ilmu akuntansi dalam pengelolaan keuangan UMKM dinilai masih kurang dipahami oleh para pengusaha. Masih banyak pengusaha kecil yang belum melakukan pencatatan atas laporan keuangan usahanya dengan baik, bahkan ada juga yang tidak melakukan pencatatan laporan keuangan pada usahanya sendiri. Para pengusaha kecil dan menengah biasanya hanya mengerjakan pembukuan sebatas pencatatan pendapatan dan pengeluaran saja. Akibatnya, laba bersih perusahaan sulit diperoleh, sehingga pengajuan kredit ke bank untuk modal usaha sulit diperoleh, dikarenakan sebagian besar dari pelaku UMKM memiliki keterbatasan-keterbatasan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2013).

Basri dan Nugroho (2009) menyebutkan bahwa pada dasarnya kondisi UMKM saat ini sedang menghadapi tiga kategori permasalahan yang sering kali mendera UMKM, yaitu :

1. Permasalahan yang bersifat klasik dan mendasar (*Basic Problems*) yaitu permasalahan modal, bentuk badan hukum yang umumnya non-formal, sumber daya manusia, pengembangan produk dan akses pemasaran.
2. Permasalahan lanjutan (*Advance Problems*) yang berupa pengenalan dan penetrasi pasar ekspor belum optimal, keterbatasan pengetahuan terkait prosedur kontrak penjualan serta peraturan di negara ekspor tujuan.
3. Permasalahan antara (*Intermediate Problems*) yakni permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. Permasalahan lain tersebut antara lain manajemen keuangan, pengajuan kredit, pelatihan kewirausahaan, dan lain-lain.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun/Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Anik Nur Rohmah, 2014 “ Perbedaan <i>Financial Literacy</i> Mahasiswa Pelaku Usaha Di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Berdasarkan Gender dan kemampuan kognitif “	- Financial Literacy - Kemampuan Kognitif - Gender	Hasil penelitian <i>Financial literacy</i> mahasiswa pelaku usaha di Fakultas Ekonomi UNY cenderung masuk pada kategori sedang. Kemampuan kognitif mahasiswa pelaku usaha di Fakultas Ekonomi UNY cenderung masuk pada kategori sedang, sedangkan ketidakadilan gender yang dialami mahasiswa pelaku usaha di Fakultas Ekonomi UNY.
2	Farah Margaretha dan Reza Arief Pambudhi, 2015 “ Tingkat Literasi Keuangan pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti “	- Literasi Keuangan - Jenis Kelamin - Usia - IPK -Pendapatan Orang Tua	Hasil pengujian menunjukkan terdapat pengaruh antara jenis kelamin, usia, IPK, dan pendapatan orang tua. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa harus meningkatkan pemahaman mereka tentang <i>personal finance</i> khususnya dalam area investasi.
3	Adib Agusta, 2016 “ Analisis Deskriptif Tingkat Literasi	- Literasi Keuangan - Tingkat Pendidikan - Gender	Hasil menunjukan bahwa tingkat literasi keuangan yang ada di Pasar Koga

	Keuangan Pada UMKM Di Pasar Koga Balam “		Bandar Lampung tergolong pada kriteria <i>well literate</i> , tingkat gender dan tingkat pendidikan menunjukkan adanya pengaruh dalam meningkatkan literasi keuangan. Kepemilikan akun yang dimiliki para pemilik UMKM di Pasar Koga Bandar Lampung didominasi oleh produk perbankan.
4	Anastasia Sri Mendari dan Suramaya Suci Kewal, 2013 “ Tingkat Literasi Keuangan Di Kalangan Mahasiswa STIE Musi Palembang “	- Literasi Keuangan - Keputusan Keuangan	Hasil penelitian mengindikasikan bahwa untuk keputusan keuangan berdasarkan beberapa hal mencerminkan kurangnya pengetahuan tentang bentuk-bentuk investasi jangka panjang yang memberikan imbal hasil dan risiko yang lebih tinggi dari deposito, serta keputusan untuk asuransi jiwa, responden tidak mengerti asuransi jiwa
5	Riski Amaliyah dan Rini Setyo Witiastuti, 2015 “ Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Keuangan Di	- Literasi Keuangan - Gender - Tingkat Pendapatan - Tingkat Pendidikan	Hasil penelitian menunjukkan tingkat literasi pemilik UMKM di kota Tegal berada dalam kategori tinggi dengan

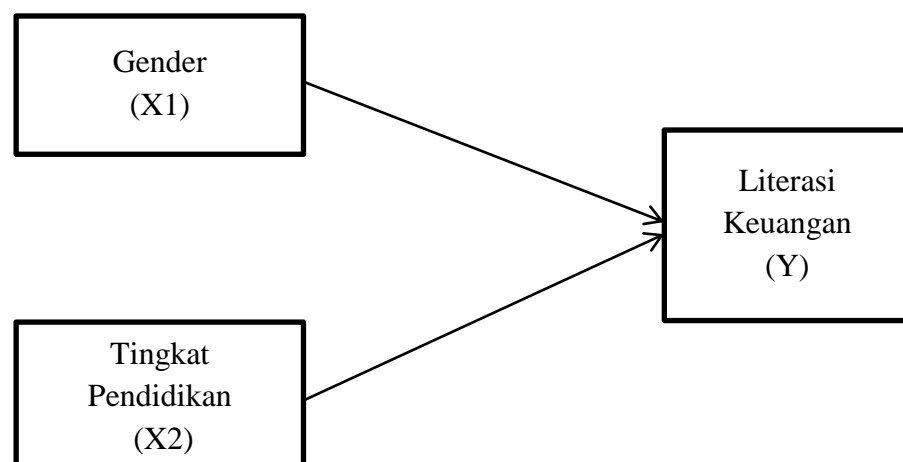
	Kalangan UMKM Tegal“		rata-rata 11,79. Gender dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat literasi pemilik UMKM di kota Tegal. Pemilik UMKM laki-laki dan tingkat pendidikan di atas wajib belajar memiliki tingkat literasi yang lebih tinggi dibandingkan wanita dan tingkat pendidikan di bawah wajib belajar. Tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan pemilik UMKM kota Tegal.
6	Rosyeni Rasyid, 2012 “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang“	- <i>Financial Literacy</i> - <i>Money Management</i> - <i>Spending & Credit</i> - <i>Saving & Investing</i>	Hasil pengujian menunjukkan bahwa literasi keuangan mahasiswa dengan komponen literasi pembiayaan, literasi kredit, literasi tabungan, dan literasi investasi mempengaruhi pengelolaan dan pengambilan keuangan mahasiswa, semakin tinggi literasi keuangan maka semakin tinggi pula tingkat pengelolaan dan pengambilan keputusan

2.6 Kerangka Pemikiran Penelitian

Suatu kesejahteraan diukur dari bagaimana masyarakat mengatur dan mengelola sumber pendapatan, hal ini membuat masyarakat harus mengetahui bagaimana cara mengelola sumber pendapatan, sehingga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sudah harus mengetahui literasi keuangan. Pada penelitian ini tingkat literasi keuangan dibatasi berdasarkan tingkat pendidikan, dan gender. karena semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh , maka masyarakat akan mempunyai pemahaman, pemahaman dan wawasan yang luas dalam mengelola sumber pendapatannya. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Bhushan and Medury (2013). Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara laki-laki dengan perempuan dalam literasi keuangan. kepemilikan terhadap produk keuangan dapat mempengaruhi Pemahaman akan literasi keuangan karena semakin banyak produk yang dimiliki oleh masyarakat. maka semakin tinggi pemahaman masyarakat akan literasi keuangan.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.7 Hipotesis Penelitian

2.7.1 Tingkat Literasi Keuangan Berdasarkan Gender

Lusardi dan Mitchell (2006, 2008) mengemukakan bahwa gender merupakan faktor dalam literasi keuangan pula, mereka menjelaskan perbedaan gender yang terlalu besar di Swedia dimana perempuan jarang membuat keputusan rumah tangga. Temuan berbeda dikemukakan oleh Fonseca, Mullen, Zamaro dan Zissimopoulos Studi Goldsmith (1997) menunjukkan bahwa perempuan memiliki minat yang sedikit mengenai investasi dan jasa keuangan yang lainnya dibandingkan dengan laki-laki.

Penelitian yang dilakukan wijayanti (2016) pada mahasiswa Universitas Negeri Malang menunjukkan mahasiswa laki-laki memiliki tingkat literasi yang lebih rendah dibandingkan mahasiswa wanita. Namun penelitian yang dilakukan Rohmah (2014) menunjukkan tidak terdapat perbedaan literasi keuangan mahasiswa pelaku usaha di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta berdasarkan gender.

2.7.2 Tingkat Literasi Keuangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Survey yang dilakukan oleh OJK juga menyatakan bahwa seseorang dengan latar belakang pendidikan perguruan tinggi memiliki tingkat pemahaman keuangan sebesar 56,4 persen, kemudian diikuti oleh pelajar sekolah menengah atas sebesar 35,7 persen, sedangkan untuk pelajar di bawah tingkat menengah atas dan tidak bersekolah menunjukkan persentase yang lebih kecil yaitu 24,6 persen dan 13,6 persen (www.hukumonline.com). Dan studi Cole et al (2008) mengemukakan bahwa tingkat pendidikan yang ada di masyarakat mempengaruhi tingkat pemahaman, semakain tinggi tingkat pemahaman maka akan semakin tinggi pula tingkat pemahamannya terhadap keuangan.

Penelitian terdahulu sejenis yang dilakukan oleh Lb-rahim et, al (2009) yang dilakukan ditingkat mahasiswa yang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman akan literasi keuangan masih sangat lemah. Hasil penelitian Amaliyah dan Witiastuti (2015) menunjukkan Pemilik UMKM dengan tingkat pendidikan di atas wajib belajar memiliki tingkat literasi yang lebih tinggi dibandingkan pemilik UMKM tingkat pendidikan di bawah wajib belajar.